



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA YOGYAKARTA

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada jajaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (PERUBAHAN RENJA SKPD) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik.

Perubahan Renja SKPD tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta disusun berdasarkan pada Rancangan Perubahan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, serta penyesuaian dengan perkembangan keadaan.

Kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan dalam penyusunan PERUBAHAN RENJA SKPD Tahun 2023 ini untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKOTA
YOGYAKARTA



AGUS ARIF NUGROHO, S.STP, M.Si
NIP. 19770907 199603 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN	
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	7
BAB III: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	20
BAB IV: PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up.

Dokumen RKPD secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, program serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023. Perencanaan pada RKPD memuat hubungan antara visi, misi dan sasaran tahunan yang diambil dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta. Perubahan perencanaan tahunan Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan disusun. Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023. Selanjutnya SKPD menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 yang mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan, memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sudah mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam pra-RKPA Tahun 2023.

Dinas Perhubungan sebagai bagian dari unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Perubahan Renja Tahun 2023 bersinergi dengan SKPD lain dalam rangka mendukung mewujudkan koridor Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang diarahkan pada tema : “Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat.”

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Ekonomi Kreatif**, merupakan penekanan bahwa ekonomi kreatif sebagai sumber-sumber penggerak ekonomi masyarakat yang terbukti mampu lolos dan beradaptasi dari krisis akibat pandemic lebih digiatkan. Ekonomi kreatif akan didorong menjadi bagian dari materi dan pendukung utama pariwisata, diantaranya melalui media, event, dan proses digitalisasi;

2. Pariwisata Budaya, pariwisata tetap menjadi basis dari penggerak kegiatan di Kota Yogyakarta baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas ekonominya. Pariwisata didukung melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan unsur kenangan.;
3. Keberdayaan Masyarakat, dalam proses pembangunan selain dipenuhinya kebutuhan dasar SDM, Masyarakat di dorong untuk dapat berdaya dalam kontribusi terhadap pembangunan wilayah dan membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal.

Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah :

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik

Dari 4 Sasaran Daerah yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu :

“Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas.”

Perubahan Renja SKPD Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta disusun untuk penyesuaian program dan anggaran yang kemungkinan berubah sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD di tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Noor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Disusunnya Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah :

- a. Agar terjadi kesesuaian, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
- b. Sebagai bahan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023;
- c. Sebagai pedoman dan gambaran dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Dinas Perhubungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi visi misi SKPD dalam mendukung visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya PERUBAHAN RENJA SKPD ini yaitu :

- a. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA), Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah (RPAPBD) Kota Yogyakarta;
- b. Sebagai acuan untuk Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023;
- c. Instrumen bagi SKPD untuk mengukur target capaian kinerja Program dan Kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- d. Memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja bulanan, tribulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat / menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD;

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan dan pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan . Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan

belanja langsung sebagaimana tabel perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pada BAB ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 sampai dengan Bulan Juni tahun berjalan mengalami perubahan serta direvisi dengan menambah dan mengurangi kegiatan dengan melihat pencapaian kinerja Dinas selama dua triwulan. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Uraian	Target Murni	Target Perub Penjabaran
Pendapatan Daerah	5.906.998.800	6.378.515.000
Pendapatan Asli Daerah	5.906.998.800	6.378.515.000
Retribusi Daerah	5.900.998.800	6.372.515.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.000.000	6.000.000
Belanja Daerah	22.144.456.103	24.268.587.297
Belanja Operasi	20.801.846.965	22.082.104.493
Belanja Pegawai	8.930.305.940	9.199.575.233
Belanja Barang dan Jasa	11.871.541.025	12.882.529.260
Belanja Modal	1.342.609.138	2.186.482.804
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.312.609.138	2.117.130.304
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000	69.352.500

Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.

Dinas Perhubungan merupakan dinas yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yang mempunyai 2 tugas utama yaitu sebagai dinas yang mengelola pendapatan dan dinas yang melaksanakan tupoksi di bidang perhubungan dengan pembiayaan/belanja dari APBD. Untuk Evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan sampai dengan Bulan Juni dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	5.541.415.000	3.179.269.000	57,37
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.830.000.000	2.814.804.000	58,28
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	711.415.000	364.465.000	51,23
2	Retribusi Jasa Usaha	359.583.800	247.016.600	68,70
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	283.983.800	147.300.000	51,87
	Retribusi Penyewaan bangunan	75.600.000	99.716.600	131,90
3	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	6.000.000	3.000.000	50
	Penggunaan Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000	3.000.000	50
	JUMLAH	5.906.998.800	3.179.269.000	57,37

Pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan setiap tribulanan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan yang dijalankan pada sasaran tersebut. Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun 2023 sebesar Rp. 22.144.456.103,- yang terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan realisasi sampai dengan bulan Juni tahun 2023 sebesar Rp. 9.916.930.299,4 atau 44,87% dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Operasional realisasi sebesar Rp. 9.839.213.229,- atau 47,30% dari anggaran sebesar Rp 20.801.846.965,- dan;
- b) untuk realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 77.717.000 atau 5,79% dari anggaran sebesar Rp. 1.342.609.138,-

Adapun capaian kinerja untuk masing-masing program/kegiatan/Sub. Kegiatan sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	91.51%	10,586,313,538.00	91,51%	6,703,566,354.00	87.34%	4,155,828,014.00	95.60%	61.98%
		Persentase juru parkir yang tertib	97.60%	0	97.60%	0	97.47	0	100.00%	0.00%
		Persentase ketertiban lalu lintas	83.00%	0	83.00%	0	90.66%	0	109.23%	0.00%
		Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik	68.29%	0	68.29%	0	65.27%	0	95.59%	0.00%
		Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas	100.00%	0	50%	0	66.66%	0	133.32%	0.00%
		Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100.00%	0	50%	0	50%	0	100.00%	0.00%
		Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	94.53%	0	94.53	0	94.12	0	100.00%	0.00%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			3,035,942,400.00		2,671,536,200.00		537,944,500.00		20.14%
	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		1,387,000,000.00	100.00%	1,387,000,000.00	48.87%	49,727,000.00	48.87%	3.59%
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	107 unit		0.00%		48.87%		0.00%	
	2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		1,648,942,400.00	78.50%	1,284,536,200.00	62.63%	488,217,500.00	79.78%	38.01%
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	155 Unit		0.00%		62.63%		0.00%	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			4,647,654,200.00		2,756,789,102.00		2,432,476,326.00		88.24%
	3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik		305,503,000.00	78.75%	212,347,502.00	78.76%	118,258,000.00	100.01%	55.69%
		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen		78.75%		78.76%		100.01%	
	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		4,342,151,200.00	62.60%	2,544,441,600.00	65.00%	2,314,218,326.00	103.83%	90.95%
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan		62.60%		65.00%		103.83%	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1,372,792,000.00		589,713,000.00		550,525,800.00		93.35%
	5	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		218,601,000.00	41.74%	91,243,000.00	41.74%	88,984,000.00	100.00%	97.52%
		Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan		41.74%		41.74%		100.00%	
	6	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan		19,260,000.00	50.00%	9,630,000.00	50.00%	9,443,000.00	100.00%	98.06%

	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		50.00%		50.00%		100.00%	
7	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan 1. Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	44 Laporan	1,134,931,000.00	45.45%	488,840,000.00	45.45%	452,098,800.00	100.00%	92.48%
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin untuk Jalan Kabupaten/Kota)				158,640,000.00		12,945,000.00		13,517,000.00		104.42%
8	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1 Dokumen	131,840,000.00	25.35%	920,000.00	25.35%	2,070,000.00	100.00%	225.00%
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	24 Laporan	15,070,000.00	45.45%	6,850,000.00	45.45%	6,617,000.00	100.00%	96.60%
10	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	24 Laporan	11,730,000.00	45.83%	5,175,000.00	45.83%	4,830,000.00	100.00%	93.33%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				453,246,138.00		243,033,138.00		213,061,188.00		87.67%
11	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan	453,246,138.00	56.03%	243,033,138.00	56.03%	213,061,188.00	100.00%	87.67%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah				416,450,800.00		166,669,914.00		157,466,700.00		94.48%
12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	513 Unit	416,450,800.00	40.02%	166,669,914.00	41.40%	157,466,700.00	103.45%	94.48%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				501,588,000.00		262,880,000.00		250,836,500.00		95.42%
13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4 Unit	325,382,000.00	50.00%	158,310,000.00	50.00%	146,659,000.00	100.00%	92.64%
14	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Orang	1,200,000.00	50.00%	600,000.00	50.00%	600,000.00	100.00%	100.00%
15	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.000 Dokumen	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	100.00%
16	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur			1,440,000.00	100.00%	1,440,000.00	100.00%	1,440,000.00	100.00%	100.00%

	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan	1 Laporan		100.00%		100.00%		100.00%	
17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	118,000,000.00	50.00%	50,000,000.00	50.00%	49,783,500.00	100.00%	99.57%
18	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	5,566,000.00	46.00%	2,530,000.00	46.00%	2,354,000.00	100.00%	93.04%
Rata-rata capaian kinerja									96.44%	92.15%
Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	11,558,142,565.00	A Nilai	7,170,275,732.00	A Nilai	5,762,252,285.00	0.00%	80.36%
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				86,173,000.00		10,234,000.00		8,007,000.00		78.24%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2,501,500.00	100.00%	2,501,500.00	100.00%	1,903,500.00	100.00%	76.09%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2,468,500.00	100.00%	2,468,500.00	100.00%	1,703,500.00	100.00%	69.01%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2,468,500.00	68.24%	1,684,500.00	68.24%	1,313,500.00	100.00%	77.98%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2,468,500.00	100.00%	2,468,500.00	100.00%	2,261,500.00	100.00%	91.61%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	2,468,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	71,822,500.00	25.00%	561,000.00	25.00%	275,000.00	100.00%	49.02%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,975,000.00	27.85%	550,000.00	27.85%	550,000.00	100.00%	100.00%

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	27.85%	27.85%	100.00%				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,932,919,190.00	5,703,993,362.00	4,498,254,549.00	78.86%			
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/Bulan	8,930,305,940.00	64.28%	5,703,676,612.00	64.28%	4,498,254,549.00	100.00%	78.87%
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dokumen	251,250.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	202,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	398,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	685,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	950,500.00	34.55%	316,750.00	34.55%	0	100.00%	0.00%
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	125,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2,232,500.00	935,000.00	935,000.00	100%			
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	445,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	455,000.00	100.00%	455,000.00	100.00%	455,000.00	100.00%	100.00%
17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	455,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	397,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%

19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	100.00%
20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	100.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				126,709,000.00		126,225,000.00		121,498,500.00		96.26%
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	126,225,000.00	100.00%	126,225,000.00	100.00%	121,498,500.00	100.00%	96.26%
22	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	484,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah				448,842,875.00		272,610,330.00		229,585,136.00		84.22%
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	10,110,000.00	100.00%	10,110,000.00	100.00%	9,675,000.00	100.00%	95.70%
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	34 Paket	136,105,125.00	85.29%	86,095,125.00	85.29%	77,769,000.00	100.00%	90.33%
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	9 Paket	30,281,750.00	100.00%	30,281,750.00	100.00%	26,025,000.00	100.00%	85.94%
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	81,000,000.00	64.12%	51,740,000.00	64.12%	43,307,000.00	100.00%	83.70%
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	8,760,000.00	49.50%	4,380,000.00	49.50%	4,380,000.00	100.00%	100.00%
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	182,586,000.00	50.67%	90,003,455.00	50.67%	68,429,136.00	100.00%	76.03%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				51,921,000.00		0		0		NAN%
29	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	6,171,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	45,750,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,090,484,000.00		571,725,040.00		522,486,512.00		91.39%
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	6,400,000.00	37.20%	2,350,000.00	37.20%	1,850,000.00	100.00%	78.72%
32	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya			406,800,000.00	60.00%	243,600,000.00	60.00%	224,206,979.00	100.00%	92.04%

	Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Laporan		60.00%		60.00%		100.00%	
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			677,284,000.00	48.86%	325,775,040.00	48.86%	296,429,533.00	100.00%	90.99%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	7 Laporan		48.86%		48.86%		100.00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				818,861,000.00		484,553,000.00		381,485,588.00		78.73%
34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	54,496,000.00	50.00%	26,348,000.00	50.00%	20,635,167.00	100.00%	78.32%
35	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	48 Unit	460,188,000.00	50.00%	216,819,000.00	50.00%	134,980,721.00	100.00%	62.26%
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	99 Unit	105,177,000.00	40.91%	42,386,000.00	40.91%	29,643,700.00	100.00%	69.94%
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199,000,000.00	100.00%	199,000,000.00	100.00%	196,226,000.00	100.00%	98.61%
Rata-rata capaian kinerja									100.00%	81.66%
Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Tinggi
Total anggaran dari seluruh program				22,144,456,103.00		13,873,842,086.00		9,918,080,299.00		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)									98.51%	71.49%
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)									Sangat Tinggi	Sedang

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 realisasi anggaran tercapai 47% dari target 100% dengan predikat Sedang. Penyebab belum optimalnya serapan program dan kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

- a) Ada ketidaksesuaian antara tata kala dengan pelaksanaan pekerjaan karena adanya perubahan pekerjaan-pekerjaan yang sulit diprediksikan di awal;
- b) Adanya beberapa kegiatan yang ikut dalam pergeseran anggaran karena kesalahan dalam penginputan kode rekening sehingga pelaksanaan kegiatan ikut bergeser.

Dalam rangka meminimalisir hambatan yang rata, maka upaya yang dilakukan antara lain:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan di internal SKPD, sehingga dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan program dan kegiatan;
- b) Perlunya perencanaan yang lebih matang dan komprehensif dalam penentuan target fisik, tatakala kegiatan, dan perencanaan penganggaran dengan tetap berpedoman pada kegiatan prioritas sehingga capaian kinerja dapat tercapai secara optimal;
- c) Intensifikasi terhadap pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
- d) Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- e) Mengefisiensikan anggaran yang tidak bisa terlaksana dan tidak terserap pada anggaran perubahan.

Adapun hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sampai dengan bulan Juni 2023 disajikan dalam tabel di bawah sebagai berikut :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023**

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Unit SKPD Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22
	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji / Jumlah Kendaraan yang di Uji x 100%	91.54%	0	86.15%	0	91.51%	10,586,313,538.00	91,51%	6,703,566,354.00	87.34%	4,155,828,014.00	95.60%	61.98%	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
			Persentase juru parkir yang tertib	Jumlah juru parkir resmi yang tertib / Jumlah juru parkir resmi x 100%	98.00%	0	97.47%	0	97.60%	0	97.60%	0	97.47	0	100.00%	0.00%	Kepala Bidang Perparkiran
			Persentase ketertiban lalu lintas	Jumlah yang menaati ketertiban lalu lintas / jumlah Total pengguna lalu lintas yang diperiksa x 100%	83.00%	0	0,00	0	83.00%	0	83.00%	0	90.66%	0	109.23%	0.00%	Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan
			Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik	Jumlah Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik / jumlah total sarpras lalu lintas x 100%	77.00%	0	65.27%	0	68.29%	0	68.29%	0	65.27%	0	95.59%	0.00%	Kepala Bidang Lalu Lintas
			Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas	Jumlah Rekomendasi yang dilayani / Jumlah Total pemohon rekomendasi x 100%	100.00%	0	0,00	0	100.00%	0	50%	0	66.66%	0	133.32%	0.00%	Kepala Bidang Lalu Lintas
			Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	Jumlah penyelenggaraan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas / Jumlah Total Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas x 100%	100.00%	0	0,00	0	100.00%	0	50%	0	50%	0	100.00%	0.00%	Kepala Bidang Lalu Lintas
			Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Sarpras parkir yang kondisi baik / Jumlah sarpras parkir x 100%	97.00%	0	94.12%	0	94.53%	0	94.53	0	94.12	0	100.00%	0.00%	Kepala Bidang Perparkiran
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							3,035,942,400.00		2,671,536,200.00		537,944,500.00		20.14%	
		1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		0		0		1,387,000,000.00	100.00%	1,387,000,000.00	48.87%	49,727,000.00	48.87%	3.59%	
		2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Rehabilitasi dan Terpelihara		0 unit		0	107 unit	1,648,942,400.00	78.50%	1,284,536,200.00	62.63%	488,217,500.00	79.78%	38.01%	
						0 Unit		0 Unit	155 Unit		0.00%		62.63%		0.00%		
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							4,647,654,200.00		2,756,789,102.00		2,432,476,326.00		88.24%	
		3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						305,503,000.00	78.75%	212,347,502.00	78.76%	118,258,000.00	100.01%	55.69%	
						0 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen		78.75%		78.76%		100.01%		
		4								4,342,151,200.00	62.60%	2,544,441,600.00	65.00%	2,314,218,326.00	103.83%	90.95%	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan		62.60%		65.00%		103.83%		
Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						1,372,792,000.00		589,713,000.00		550,525,800.00		93.35%	
5	Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	218,601,000.00	41.74%	91,243,000.00	41.74%	88,984,000.00	100.00%	97.52%	
6	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	19,260,000.00	50.00%	9,630,000.00	50.00%	9,443,000.00	100.00%	98.06%	
7	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan 1. Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	0 Laporan	0 Laporan	44 Laporan	1,134,931,000.00	45.45%	488,840,000.00	45.45%	452,098,800.00	100.00%	92.48%	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						158,640,000.00		12,945,000.00		13,517,000.00		104.42%	
8	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	131,840,000.00	25.35%	920,000.00	25.35%	2,070,000.00	100.00%	225.00%	

	9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0 Laporan	0 Laporan	24 Laporan	15,070,000.00	45.45%	6,850,000.00	45.45%	6,617,000.00	100.00%	96.60%				
	10	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0 Laporan	0 Laporan	24 Laporan	11,730,000.00	45.83%	5,175,000.00	45.83%	4,830,000.00	100.00%	93.33%				
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							453,246,138.00		243,033,138.00		213,061,188.00		87.67%				
	11	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	453,246,138.00	56.03%	243,033,138.00	56.03%	213,061,188.00	100.00%	87.67%				
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							416,450,800.00		166,669,914.00		157,466,700.00		94.48%				
	12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	0 Unit	513 Unit	416,450,800.00	40.02%	166,669,914.00	41.40%	157,466,700.00	103.45%	94.48%				
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							501,588,000.00		262,880,000.00		250,836,500.00		95.42%				
	13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	0 Unit	4 Unit	325,382,000.00	50.00%	158,310,000.00	50.00%	146,659,000.00	100.00%	92.64%				
	14	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang	8 Orang	1,200,000.00	50.00%	600,000.00	50.00%	600,000.00	100.00%	100.00%				
	15	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Dokumen	0 Dokumen	2,000 Dokumen	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	100.00%				
	16	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1,440,000.00	100.00%	1,440,000.00	100.00%	1,440,000.00	100.00%	100.00%				
	17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	0 Unit	0 Unit	2 Unit	118,000,000.00	50.00%	50,000,000.00	50.00%	49,783,500.00	100.00%	99.57%				
	18	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	5,566,000.00	46.00%	2,530,000.00	46.00%	2,354,000.00	100.00%	93.04%				
Rata-rata capaian kinerja												96.44%	92.15%				
Predikat kinerja												Sangat	Sangat				
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	0	A Nilai	0	A Nilai	11,558,142,565.00	A Nilai	7,170,275,732.00	A Nilai	5,762,252,285.00	0.00%	80.36%	Sekretariat Dinas Perhubungan
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							86,173,000.00		10,234,000.00		8,007,000.00		78.24%				
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	2,501,500.00	100.00%	2,501,500.00	100.00%	1,903,500.00	100.00%	76.09%				
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2,468,500.00	100.00%	2,468,500.00	100.00%	1,703,500.00	100.00%	69.01%				
	3			0	0		2,468,500.00	68.24%	1,684,500.00	68.24%	1,313,500.00	100.00%	77.98%				

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	68.24%	2,468,500.00	100.00%	2,468,500.00	68.24%	2,261,500.00	100.00%	91.61%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	2,468,500.00	0.00%	0	100.00%	0	100.00%	0.00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	0.00%	71,822,500.00	25.00%	561,000.00	0.00%	275,000.00	100.00%	49.02%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan												

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	25.00%	1,975,000.00	27.85%	550,000.00	27.85%	550,000.00	100.00%	100.00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	27.85%	8,932,919,190.00	5.703,993,362.00	27.85%	4,498,254,549.00	100.00%	78.86%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	71 Orang/Bulan	64.28%	8,930,305,940.00	5,703,676,612.00	64.28%	4,498,254,549.00	100.00%	78.87%	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	0.00%	251,250.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	0.00%	202,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0.00%	398,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0.00%	685,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	34.55%	950,500.00	316,750.00	34.55%	0	100.00%	0.00%	
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0.00%	125,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0.00%	2,232,500.00	935,000.00	0.00%	0	0.00%	0.00%	
							445,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

	16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	455,000.00	100.00%	455,000.00	100.00%	455,000.00	100.00%	100.00%
	17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	455,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
	18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	397,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
	19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	100.00%
	20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	100.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							126,709,000.00		126,225,000.00		121,498,500.00		96.26%
	21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0 Paket	110 Paket	126,225,000.00	100.00%	126,225,000.00	100.00%	121,498,500.00	100.00%	96.26%
	22	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	484,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah							448,842,875.00		272,610,330.00		229,585,136.00		84.22%
	23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0 Paket	0 Paket	6 Paket	10,110,000.00	100.00%	10,110,000.00	100.00%	9,675,000.00	100.00%	95.70%
	24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 Paket	0 Paket	34 Paket	136,105,125.00	85.29%	86,095,125.00	85.29%	77,769,000.00	100.00%	90.33%
	25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0 Paket	0 Paket	9 Paket	30,281,750.00	100.00%	30,281,750.00	100.00%	26,025,000.00	100.00%	85.94%
	26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0 Paket	0 Paket	3 Paket	81,000,000.00	64.12%	51,740,000.00	64.12%	43,307,000.00	100.00%	83.70%
	27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	8,760,000.00	49.50%	4,380,000.00	49.50%	4,380,000.00	100.00%	100.00%
	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	75 Laporan	182,586,000.00	50.67%	90,003,455.00	50.67%	68,429,136.00	100.00%	76.03%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							51,921,000.00		0		0		NAN%
	29	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 Unit	0 Unit	2 Unit	6,171,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
	30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 Unit	0 Unit	5 Unit	45,750,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,090,484,000.00		571,725,040.00		522,486,512.00		91.39%
	31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	6,400,000.00	37.20%	2,350,000.00	37.20%	1,850,000.00	100.00%	78.72%
	32	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber	0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	406,800,000.00	60.00%	243,600,000.00	60.00%	224,206,979.00	100.00%	92.04%

		Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	0 Laporan	0 Laporan	5 Laporan		60.00%		60.00%		100.00%		
	33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	0 Laporan	0 Laporan	7 Laporan	677,284,000.00	48.86%	325,775,040.00	48.86%	296,429,533.00	100.00%	90.99%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							818,861,000.00		484,553,000.00		381,485,588.00		78.73%	
	34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0 Unit	0 Unit	9 Unit	54,496,000.00	50.00%	26,348,000.00	50.00%	20,635,167.00	100.00%	78.32%	
	35	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	0 Unit	0 Unit	48 Unit	460,188,000.00	50.00%	216,819,000.00	50.00%	134,980,721.00	100.00%	62.26%	
	36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	0 Unit	0 Unit	99 Unit	105,177,000.00	40.91%	42,386,000.00	40.91%	29,643,700.00	100.00%	69.94%	
	37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	1 Unit	199,000,000.00	100.00%	199,000,000.00	100.00%	196,226,000.00	100.00%	98.61%	
Rata-rata capaian kinerja												100.00%	81.66%	
Predikat kinerja												Sangat	Tinggi	
Total anggaran dari seluruh program							22,144,456,103.00		13,873,842,086.00		9,918,080,299.00			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)												98.51%	71.49%	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)												Sangat	Sedang	

Yogyakarta,

Disusun oleh
DINAS PERHUBUNGAN

AGUS ARIF NUGROHO, S.STP, M.Si
NIP. 197709071996031001

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pada BAB ini menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan perubahan-perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Renja Dinas Perhubungan mencakup Pendapatan dan Belanja, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Dari sisi nomenklatur Program dan Kegiatan tidak ada perubahan, tetapi lebih pada penambahan atau pengurangan output kegiatan, penyesuaian pada aturan Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang baru, serta efisiensi pada sisa-sisa pengadaan barang/jasa yang sudah ada ikatan kontraknya. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 terdiri dari 2 Program dan 15 Kegiatan serta 55 Sub. Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

- d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
 - b. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 - 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - d. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 4. Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - c. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- 5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - c. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- 6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan
 - a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
- 7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2023-2026 terdapat 2 revisi yaitu nomenklatur dan metode perhitungan pada Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAj) dengan rincian sebagai berikut:

- Nomenklatur Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAj) yang sebelumnya Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas menjadi Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar dengan metode perhitungan sebelumnya jumlah rekomendasi yang dilayani dibagi jumlah total pemohon rekomendasi dikali 100% menjadi jumlah layanan pengendalian dampak lalu lintas sesuai standar dikali 100%
- Nomenklatur Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAj) yang sebelumnya Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menjadi Jumlah manajemen dan rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan dengan metode semula Jumlah Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dibagi Jumlah Total Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan target semula 100% menjadi angka 2

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2023 untuk Pendapatan sebesar Rp.6.378.515.000 sedangkan untuk Belanja sebesar Rp. 24.268.587.297. Berikut hasil rekapitulasi Anggaran Perubahan pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 :

**REKAPITULASI ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA**

No	Uraian	Target Murni	Target Perub APBD	Keterangan
A	PENDAPATAN	6.378.515.000	6.378.515.000	Pendapatan Mengalami kenaikan karena berangsur-angsur perekonomian masyarakat sudah mulai membaik
1	Retribusi Jasa Umum	5.811.415.000	5.811.415.000	
1.1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.830.000.000	5.100.000.000	
1.2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	711.415.000	711.415.000	
2	Retribusi Jasa Usaha	561.100.000	561.100.000	
2.1	Retribusi Penyewaan Bangunan	75.600.000	75.600.000	
2.2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	283.983.800	485.500.000	
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.000.000	6.000.000	
3.1	Penggunaan Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000	6.000.000	
B	BELANJA LANGSUNG	22.144.456.103	24.268.587.297	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	11.558.142.565	12.052.251.383	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.173.000	86.173.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.932.919.190	9.202.188.483	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.232.500	2.232.500	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.709.000	123.266.500	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.842.875	477.354.900	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.921.000	174.921.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.090.484.000	1.151.134.000	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	818.861.000	834.981.000	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAj)	3.035.942.400	237.792.700	
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.035.942.400	3.216.707.966	
2.2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	4.647.654.200	5.559.626.000	
2.3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	501.588.000	960.099.000	
2.4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.372.792.000	1.385.367.000	

2.5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	158.640.000	146.639.660
2.6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	453.246.138	507.994.888
2.7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416.450.800	439.900.800

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra serta untuk menjaga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan dilengkapi dengan Matrik Renja, yang berisi Program/Kegiatan, Capaian Program/Kegiatan/Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif.

Perubahan Rencana Kerja SKPD ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat serta dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang muncul terkait bidang Perhubungan.